

PILKADA DARI PERSPEKTIF INCUMBENT
(*Studi Analisis Pilkada Kabupaten Batang Periode 2017-2022*)

Teguh Adi Prasajo

Abstract

Implementation of direct local elections intended to further democratize the local elections. The purpose either contained in the implementation of the elections was still far short of expectations since the fact of elections is still in need of improvement in many aspects one of which was the election as a means to legitimize the local authority to make the local elections as a means to legalize their power, and they can both with easy to carry out political dynasty against their close relatives. All these shortcomings urgent we to complete because any shortcomings that still exist precisely then result in the emergence of the reluctance of the people who actually have great potential as occurs in Yoyo Riyo Sudibyo are reluctant to re-nominate themselves as regents, citing fears of "addiction" This implies a system that needs to be we need to fix.

Key Words: Local Elections, Local Elections Weaknes, Voters

A. PENDAHULUAN

Kekuasaan dan politik merupakan dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan, terlebih bagi tokoh politik yang sudah dikenal baik dan di cintai oleh masyarakat. Menjadi suatu hal yang istimewa kemudian jika seorang tokoh yang dicintai tersebut lebih memilih untuk melepaskan tampuk kekuasaan yang sudah diperoleh dan mempunyai peluang besar untuk dapat mempertahankannya. Hal ini terjadi pada Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah dimana Bupati terpilih periode 2012-2017 mengeluarkan *Statement* bahwa Beliau tidak akan kembali mencalonkan diri sebagai Bupati Batang. *Statement* tersebut tak pelak membuat berbagai spekulasi bagi pengamat politik, baik di kalangan Akademisi maupun kalangan politisi terlebih politisi yang memiliki niatan untuk maju ke Pilkada Batang 2017.

Yoyok Rio Sudibyo sepertinya tidak tanpa perhitungan ketika mengeluarkan *statement* bahwa beliau tidak akan kembali mencalonkan diri pada Pilkada 2017. Pria kelahiran kabupaten Batang 44 tahun yang lalu itu juga pernah mengambil keputusan penting ketika beliau memutuskan untuk keluar dari kesatuan TNI dengan pangkat terakhir Mayor. Dari latar belakang ini Kami yakin bahwa keputusan Yoyok untuk berhenti dari dunia Politik Praktis bukanlah sesuatu yang baru karena sudah pernah terjadi sebelumnya ketika berhenti dari dunia Militer meskipun beliau memiliki karier yang cemerlang di Militer.

Awal mula terjunnya Yoyok dalam Pilkada Kabupaten Batang tahun 2011, beliau maju sebagai calon *independent* yang didukung oleh kelompok masyarakat, petani dan para Pegiat LSM. Detik-detik batas waktu penyerahan daftar calon Pilkada ke KPUD, beberapa partai besar memberikan dukungan ke Yoyok diantaranya Partai Golkar, PPP, PAN, dan Demokrat sehingga pada akhirnya Yoyok maju dengan Partai Sebagai Kendaraan Politiknya pada Pilkada 2011. Dengan partai politik sebagai kendaraan, Yoyok berhasil meraih kemenangan pada Pilkada 2011 dengan perolehan 113.027 suara (40,03 persen) mengalahkan dua kandidat lainnya, yakni Susi Iriani-Lafran Panca Putranto (62.397 suara atau 22,10 persen), dan Dheddy Irawan-Mujarwo (107.992 suara atau 37,87 persen).

Yoyok-Soetadi yang mengusung visi “Birokrasi Bersih, Ekonomi Bangkit” berhasil memenangkan hati rakyat. Hati rakyat berhasil dimenangkan karena beliau berhasil merealisasikan Visi tersebut ke dalam program kerja mereka sehingga tidak butuh waktu lama hanya dalam waktu dua tahun pemerintahan beliau dapat meningkatkan PAD Kabupaten Batang lebih dari 100 persen, dapat dilihat dari tabel 1.1 dimana data tersebut Penulis peroleh dari BPS yang mendapatkan laporan dari BPS Kabupaen/Kota.

Tabel 1.1
Pendapatan Asli Daerah Menurut Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah Tahun
Anggaran 2011 - 2013 (Ribu Rupiah)

	Kabupaten/Kota <i>Regency/City</i>	2011	2012	2013
01.	Kab. Cilacap	173.141.334	196.673.442	278.507.546
02.	Kab. Banyumas	193.263.340	242.106.509	308.349.434
03.	Kab. Purbalingga	94.937.162	112.727.590	122.858.739
04.	Kab. Banjarnegara	71.107.053	94.271.468	98.975.320
05.	Kab. Kebumen	73.339.838	102.344.166	131.481.737
06.	Kab. Purworejo	88.941.782	98.262.003	125.756.041
07.	Kab. Wonosobo	67.397.977	82.335.296	108.729.509
08.	Kab. Magelang	90.462.631	123.722.781	173.253.652
09.	Kab. Boyolali	96.489.134	127.725.207	160.752.450
10.	Kab. Klaten	72.293.790	84.756.022	115.454.162
11.	Kab. Sukoharjo	96.166.807	164.954.319	192.971.720
12.	Kab. Wonogiri	77.141.691	100.037.192	111.592.606
13.	Kab. Karanganyar	104.080.774	116.706.893	161.724.334
14.	Kab. Sragen	94.518.999	127.695.844	146.721.550
15.	Kab. Grobogan	87.912.458	105.463.321	143.598.616
16.	Kab. Blora	67.021.770	81.987.007	95.186.717
17.	Kab. Rembang	73.931.946	102.727.487	126.808.084
18.	Kab. Pati	134.475.562	163.733.666	169.127.416
19.	Kab. Kudus	102.621.949	113.622.250	144.995.092
20.	Kab. Jepara	103.642.014	129.076.570	133.778.055

21.	Kab. Demak	74.559.136	105.363.370	138.214.446
22.	Kab. Semarang	129.771.004	156.192.739	215.684.519
23.	Kab. Temanggung	63.328.489	76.637.673	102.080.197
24.	Kab. Kendal	93.289.527	120.162.136	132.870.703
25.	Kab. Batang	60.155.029	84.720.050	139.634.472
26.	Kab. Pekalongan	82.105.270	114.793.366	148.550.938
27.	Kab. Pemasang	79.677.543	97.951.208	136.362.282
28.	Kab. Tegal	90.133.274	118.741.620	156.244.860
29.	Kab. Brebes	78.275.852	101.806.858	135.055.402
30.	Kota Magelang	63.557.702	90.986.302	107.739.839
31.	Kota Surakarta	181.096.816	231.672.100	298.400.847
32.	Kota Salatiga	60.611.340	63.171.463	106.100.450
33.	Kota Semarang	522.925.031	786.563.412	925.919.311
34.	Kota Pekalongan	63.344.978	91.205.786	114.252.439
35.	Kota Tegal	117.244.291	156.663.028	176.377.335
	Jumlah/Total	3.722.963.294	4.867.560.145	6.084.110.818

Sumber : Pemerintah Kabupaten/Kota

Dari tabel 1.1 di atas dapat kita amati bahwa PAD kabupaten Batang naik sangat signifikan melebihi angka 100 persen hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun karena Yoyok dilantik sebagai Bupati Batang baru awal tahun 2012. Dari tabel di atas juga dapat kita amati bahwa kenaikan PAD Kabupaten Batang merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Jawa Tengah dan Kabupaten Pati merupakan Kabupaten dengan kenaikan PAD terendah di Jawa Tengah.

Dengan berbagai prestasi yang telah dicapai oleh Yoyok, kemudian menjadi hal yang menarik ketika beliau mengeluarkan Statement untuk tidak lagi maju dalam Pilkada. statement tersebut memunculkan pertanyaan yang besar, kaitannya dengan apa sebenarnya alasan utama seorang Mayjen Yoyok Rio Sudibyo mengundurkan diri dari percaturan Politik daerah. Fenomena tidak lazim inilah yang kemudian membuat tulisan dengan judul **“PILKADA DARI PERSPEKTIF INCUMBENT Studi Analisis Pilkada Kabupaten Batang periode 2017-2022”** Kami anggap layak untuk didalami sebagai sarana untuk memperkaya khasanah ilmu sosial politik bagi kaum akademik maupun pihak-pihak yang memiliki ketertarikan di bidang Sosial dan Politik.

B. PEMBAHASAN

B.1. Pilkada dan Dinasti Politik di Daerah

Dari berbagai sumber media yang melakukan *interview* dengan Yoyok, banyak yg kemudian mempertanyakan alasan beliau untuk turun gelanggang pertarungan Pilkada Kabupaten Batang 2017. Hal yang sama ketika beliau ditanyakan oleh awak media perihal rencana beliau untuk tidak mencalonkan diri dalam Pilkada Batang 2017.

“kenapa nggak nyalon lagi? Kan sumpah saya sudah selesai. Lima tahun janji saya sudah terlaksana. Bangun rumah sakit, pasar, dan jalan tembusan Batang, sudah beres. Takutnya kalau saya nyalon lagi, takut keenakan. Mungkin sehabis saya, nanti istri saya. Lalu turun ke anak saya. Itu kan bukan pemimpin namanya, (tapi) penguasa. Jadi pemimpin itu susah sekali.”

Salah satu hal yang dapat Kita cermati dari jawaban yoyok terkait alasannya tidak kembali mencalonkan diri dalam Pilkada Batang adalah munculnya kekhawatiran akan munculnya dinasti politik. Kekhawatiran ini muncul karena Yoyok merasa sudah memenuhi janji politiknya ketika kampanye sehingga beliau merasa ketika kembali mencalonkan diri dan kemudian terpilih maka beliau akan “keenakan” dan akan memiliki kecenderungan untuk terus mempertahankan kekuasaannya yang akan di teruskan oleh istrinya dan bukan tidak akan menutup kemungkinan sampai kepada anak beliau inilah yang kemudian akan memunculkan dinasti Politik.

Dinasti Politik sebenarnya bukan hal baru di negara Kita, bahkan sudah menjadi sesuatu yang lazim terjadi dalam politik. Dalam politik internasional mungkin kita tidak asing dengan dinasti Gandhi, dinasti Nehru, dinasti Buttho dan dinasti Kim. Semua dinasti yang telah disebutkan seluruhnya berasal dari Asia, akan tetapi dinasti politik bukan monopoli negara-negara Asia belaka. Amerika Serikat yang menganggap dirinya sebagai negara paling demokratis juga ternyata dunia mengenal ada beberapa dinasti politik di negara “om Sam” itu. Beberapa dinasti politik di Amerika Serikat diantaranya adalah dinasti Kennedy dan Bush merupakan contoh dinasti Politik di Amerika Serikat dan bukan tidak mungkin deretan Nama ini akan terus bertambah panjang terutama jika Hillary berhasil memenangkan Pemilu Presiden kali ini untuk dinasti Clinton.

Pada tataran Politik Nasional, ada nama Soekarno, SBY, Atut, Ahok, Yusril dan masih banyak nama lain di daerah. Dari nama-nama itu bisa dikatakan kalau dinasti Soekarno merupakan dinasti politik terkuat di Indonesia dengan indikator Sudah ada dua Presiden dari dinasti ini. Daftar nama dinasti politik di negara ini semakin panjang seiring dengan dibukanya “keran” politik di daerah, di akui atau tidak paska otonomi daerah banyak kemudian muncul nama “raja-raja kecil” di daerah yang berusaha melegitimasi kekuasaan bayangan yang mereka miliki dengan jalan Pilkada. Setelah terlegitimasi, hal berikutnya adalah mencari jalan untuk mempertahankan kekuasaan merkadengan jalan menurunkannya kepada keturunan mereka atau kerabat dekat mereka dan inilah awal dinasti politik di daerah.

Terkait dengan dinasti politik yang dikhawatirkan oleh Yoyok, sebenarnya beliau tidak harus merisaukan akan munculnya dinasti politik dari “Clan” beliau kalau proses pendidikan politik masyarakat di daerah sudah baik. Maksudnya, masyarakat sebagai *vouters* memilih kandidat

tidak hanya berdasarkan si'A atau si'B keturunan siapa melainkan berdasarkan program kerja yang ditawarkan atau kinerja yang ditunjukkan saat ini. Selain itu, menurut pendapat Kami sebenarnya dinasti politik itu sah-sah saja untuk dilakukan.

Dinasti politik sangat sah untuk dilakukan jika memenuhi beberapa kriteria;

- a. Rakyat sudah mampu memberikan pilihan dengan Objektif tidak hanya berdasarkan keturunan atau hubungan kekerabatan dengan pemimpin sebelumnya.
- b. Anggota dinasti yang ditawarkan memang berkompetensi untuk mengisi jabatan (*Primus Interpares*) dan melewati proses pencalonan yang sama dengan bakal calon lain.
- c. Harus ada tahapan yang jelas dalam kaderisasi misalnya; seseorang tidak bisa menjadi pimpinan Partai hanya karena dia kerabat dari Pemimpin sebelumnya berkaca dari kasus pencalonan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Gubernur DKI padahal sebelumnya beliau tidak pernah sekalipun terjun dalam politik praktis

Tanpa adanya ketiga hal tersebut di atas, dapat kami katakan bahwa dinasti politik tidak layak untuk dilakukan di negara Kita. Alasan ketidak layakan dinasti politik dilakukan lebih karena dinasti politik yang tidak memenuhi syarat akan lebih membawa mudharat daripada manfaat. Beberapa mudharat yang dimaksudkan diantaranya;

- a. **Merajalelanya politik uang**, politik uang akan semakin merajalela karena calon yang maju dalam Pilkada tanpa modal politik yang kuat mempunyai kecenderungan untuk menggunakan modal ekonomi sebagai daya tariknya.
- b. **Pemerintahan yang tidak stabil**, calon yang maju dengan mengutamakan modal ekonomi tentunya tidak ingin merugi jadi kecenderungannya mereka akan berusaha untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan yang mereka miliki guna mengganti modal yang mereka gunakan pada masa kampanye.
- c. **Mengganggu proses politik di daerah**, dengan munculnya dinasti politik yang tidak sesuai dengan kriteria akan mematikan proses politik di daerah karena tokoh-tokoh lokal yang memiliki potensi akan merasa enggan untuk bertarung dengan “politikus karbitan” yang hanya mengandalkan nama dari orang tuanya.
- d. **Mengarah kepada kekuasaan yang Absolute**, kekuasaan yang harusnya terbatas dengan adanya dinasti politik membuat batas tang ada menjadi kabur karena waktu yang menjadi batasan seorang penguasa untuk duduk di kursi kekuasaan bisa diakali dengan “mewariskan” kepada kerabat dekat mereka. Misalnya bila jabatan kepala daerah, dipegang oleh satu keluarga dekat yang berlangsung lama secara terus menerus, misalnya setelah 10 tahun menjabat, kemudian digantikan oleh istrinya selama sepuluh tahun lagi, kemudian oleh anaknya dan seterusnya.

Melihat dari apa yang disampaikan di atas cukup memberikan gambaran pada Kita mengenai hal yang dikhawatirkan oleh Yoyok. Menjadi wajar kemudian jika Yoyok yang dari awal hanya mempunyai niatan untuk membangun Kabupaten Batang tanpa ada niatan untuk melanggengkan kekuasaannya.

B.2. Pilkada dan Rekrutmen Politik

Fenomena mundurnya seorang Bupati yang memiliki potensi dari gelanggang politik dengan potensi kemenangan politik bisa dikatakan lebih dari 50% merupakan salah satu hal yang menarik dan layak untuk di dalam. Layak di dalam tidak hanya dari sudut pandang pelaku, akan tetapi perlu kita dalam dari sudut pandang partai yang pernah mengusungnya maupun dari sudut pandang lawan politiknya. Yoyok Riyo Sudibyo yang memunculkan *statement* bahwa beliau tidak akan mencalonkan diri dalam Pemilu kepala daerah periode 2017-2022 ditanggapi beragam oleh berbagai pihak.

Kekhawatiran yang ditunjukkan oleh partai politik membuktikan bahwa mereka belum siap, siap dalam artian mempunyai kader-kader yang siap untuk dicalonkan. Ketidaksiapan ini juga memberikan kita gambaran bahwa partai politik belum mampu menjalankan fungsi politiknya untuk melakukan rekrutmen bakal calon pemimpin dalam hal ini bakal calon Bupati. Sistem rekrutmen bakal calon yang diberlakukan partai politik berbeda-beda, namun ada dua sistem rekrutmen yang dipraktekan oleh partai politik di berbagai belahan dunia;

- a. **Sistem pemilihan tertutup**, merupakan sistem rekrutmen bakal calon yang dilakukan hanya oleh pengurus partai politik dengan berbagai variasi sistem. Istilah “variasi sistem” merujuk pada mekanisme penentuan akhir bakal calon yang akan mengikuti kompetisi pilkada langsung atau yang akan menjadi calon. Partai politik yang demokratis dengan sistem kepemimpinan yang demokratis umumnya menetapkan pengurus partai politik setempat sebagai penentu akhir pencalonan. Sedangkan partai politik konservatif dengan sistem kepemimpinan bergantung pada figur, pengurus pusat menjadi penentu akhir pencalonan.
- b. **Sistem Konvensi**, sistem ini sangat populer di negara demokrasi. Sistem ini dilakukan dengan cara pemilihan pendahuluan terhadap bakal calon dari partai politik oleh pengurus dan/atau anggota partai. Kelebihan sistem konvensi terletak pada pengembangan atau peningkatan popularitas bakal calon melalui proses kampanye internal partai dan pendidikan politik yang ditawarkan. Sistem ini sangat efektif bagi partai kader, dan sebaliknya kurang efektif bagi partai massa.

Berdasarkan dua sistem rekrutmen bakal calon di atas, dapat kita amati bersama bahwa sebagian besar partai politik di negara kita lebih

cenderung menggunakan sistem rekrutmen tertutup dimana akhir pencalonan di tentukan oleh pengurus pusat. Sistem seperti ini pula yang kemudian mematkan konsep kaderisasi di tubuh partai. Karena dengan sistem yang rekrutmen yang bersifat tertutup maka persaingan di tubuh partai tidak bisa berjalan dengan *Sportif*. Bakal calon yang mempunyai hubungan dekat dengan para pengurus partai pusat akan lebih dipertimbangkan dibandingkan dengan bakal calon yang memiliki popularitas tinggi di masyarakat dan memiliki program kerja yang bagus.

Pada dasarnya kaderisasi memiliki fungsi strategis bagi sebuah partai politik, tanpa adanya kader yang berkualitas sebuah partai tidak akan mampu memberikan manfaat bagi para konstituennya terlebih bagi masyarakat umum. Dalam melakukan proses pengkaderan ada dua persoalan penting;

Pertama, bagaimana usaha yang dilakukan oleh organisasi dalam hal ini partai politik untuk peningkatan kemampuan baik keterampilan maupun pengetahuan. Keterampilan yang dimaksud adalah keterampilan bagaimana memimpin dan keterampilan yang berkaitan dengan menggali, mengasah dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh organisasi yang dipimpinnya. Terkait dengan keterampilan, diawal pemerintahan Yoyok pernah merasa tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk membawa Kabupaten Batang ke arah yang lebih baik seperti yang tergambarkan dalam interview yang dilakukan oleh awak media kepada Yoyok.

“Karier Anda berawal dari tentara, lalu saat ini sangat berbelok menjadi kepala daerah. Sudah 3 tahun Anda menjadi Bupati Batang. Apa tantangan yang Anda hadapi selama 3 tahun ini? Saya baru merasakan tahun 2015 jadi bupati. Tahun 2012, 2013 dan 2014, saya belum merasakan jadi bupati, masih gagap. Tapi awalnya berat. Bisa dibayangkan, dengan ketidaktahuan, apa pun saya harus memimpin "PT Kabupaten Batang" (Kabupaten Batang, Jawa Tengah), di mana anak buahnya sudah puluhan tahun di sana, ilmunya sudah "master". Saya juga harus mempertanggungjawabkan dana dari pemerintah pusat Rp1,2 triliun sekian, sementara saya tidak mempunyai pengalaman apa pun. Menurut saya, kalau ingin jadi bupati, minimal harus dididik 6 bulan. Bukan cuma yang punya partai dan punya duit saja. Itu masih kurang. Saat saya terpilih jadi bupati, saya baru mencari tahu ke teman-teman. Pengalaman indah saya jadi bupati, saya bisa lihat tipikal orang dari A sampai Z. Kalau dulu (saat) kecil, saya diajarkan orang tua itu jelas. Warna cuma dua, hitam sama putih. Setelah saya jadi bupati, (warna) ternyata beragam.”

“Berarti Anda tidak mempunyai modal pengetahuan yang cukup saat mencalonkan diri jadi kepala daerah?Selama perjalanan itu selalu belajar sambil bekerja. Itu aneh memang. Jadi kalau ada cerita

di Indonesia, ada kepala daerah yang membaca pidato "bapak dua, ibu dua", karena begitu (tertulisnya). Tapi itulah. Tiga tahun ini luar biasa. Tapi semua orang saya rangkul. Saya belum pernah menemui calon kepala daerah yang psikotesnya nggak lulus. Dulu, saya kalau ingin naik pangkat (di ketentaaraan) harus psikotes ulang. Berpuluh-puluh kali saya ikut psikotes. Psikotesnya sangat penting, bisa mengetahui si A ini cocok nggak jadi komandan. Saya minta tolong dari siapa pun dan kapan pun."

Dari jawaban atas pertanyaan yang pertama maupun kedua, cukup nampak jelas bahwa di awal masa jabatannya Yoyok merasa kesulitan. Inilah yang sebenarnya perlu dilakukan oleh partai politik, dengan optimalnya proses pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik seharusnya hal ini tidak terjadi. Apabila partai politik sudah mampu menjalankan fungsinya dalam pendidikan politik dan fungsi agregasi kepentingan.

Kedua, kemampuan untuk menyediakan stok kader yang di khususkan kepada kaum muda. Kegagalan partai politik untuk melahirkan para pemimpin bangsa yang berkualitas telah dicatat oleh sejarah. Kenyataannya, parpol hanya sibuk demi meraih kekuasaan tanpa diimbangi penyiapan kader partai yang matang. Mereka nyaris tidak memandang "perlu" untuk terus meningkatkan kualitas para kader dan pemimpin yang mereka miliki. Pola kaderisasi yang masih setengah hati, serampangan, dan miskin konsep seolah menjadi identitas yang tepat bagi keseriusan pembangunan SDM dalam sebuah Parpol. Kenyataannya lagi menunjukkan bahwa kondisi parpol semakin parah manakala ia hanya berorientasi utama mendulang suara sebanyak mungkin tanpa dibarengi dengan upaya peningkatan kualitas kadernya. Kader-kader partai yang muncul akhirnya menjadi pemimpin karbitan. Kualitas para pemimpin yang dihasilkan oleh partai terasa memprihatinkan. Beberapa parpol bahkan hanya menggunakan sistem "urut kacang" pada para kader mereka untuk menjadi pemimpin tanpa dilalui penjurangan dan pematangan yang cukup.

B.3. Pilkada dan Tipe Pemilih

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang [Pemerintahan Daerah](#), kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Konsep dilakukannya Pilkada secara langsung sebenarnya adalah untuk lebih mendemokratisasikan Pilkada yang sebelumnya rakyat hanya menerima kepala daerah yang "diminta" untuk memimpin mereka. Dengan diberlakukannya Pilkada secara langsung, dimana rakyat berhak memilih secara langsung siapa pemimpin mereka. Dipilihnya pemimpin secara langsung oleh rakyat, secara konsepnya sebenarnya sangat baik dimana dimaksudkan untuk membuat para kepala daerah terpilih lebih memperhatikan rakyat yang memilih mereka. Konsep yang baik tersebut pada kenyataannya masih bisa sepenuhnya dijalankan dengan berbagai

batasan yang terjadi di masyarakat mulai dari bermainnya politik uang sampai pada antipatinya masyarakat terhadap pelaksanaan Pilkada.

Pada dasarnya seorang pemilih, ketika memilih sebuah partai atau seorang kandidat baik itu kandidat legislatif maupun kandidat eksekutif terdapat dua orientasi yang mereka gunakan yaitu;

1. Orientasi '*policy-problem-solving*'

Ketika seorang pemilih menilai partai politik atau seorang kontestan dari kacamata '*policy-problem-solving*', yang terpenting bagi mereka adalah sejauh mana para kontestan mampu menawarkan program kerja atas solusi bagi suatu permasalahan yang ada. Pemilih akan cenderung secara objektif memilih partai politik atau kontestan yang memiliki kepekaan terhadap masalah nasional dan kejelasan program kerja.

2. Orientasi "*Ideology*"

Seorang pemilih yang lebih mementingkan ikatan '*ideology*', akan lebih menekankan aspek subjektivitas seperti kedekatan nilai, budaya, agama, moralitas, norma, emosi, dan psikografis. Semakin dekat kesamaan partai politik atau calon kontestan, pemilih jenis ini akan cenderung memberikan suaranya ke partai dan kontestan tersebut.

Dari sudut pandang orientasi apabila kita kaitkan dengan *Javanese Voters* nya Affan Gaffar, maka dapat kita simpulkan bahwa para pemilih lebih memiliki kecenderungan berorientasi pada *ideology* dari pada orientasi *policy-problem-solving*. Affan Gaffar dalam *Javanese Voters* membagi masyarakat Jawa menjadi tiga golongan besar yaitu, *santri* yang mewakili kaum agamis, *abangan* terdiri dari para petani kecil, dan golongan *priyayi* tercermin pada kaum terpelajar atau para pegawai yang mayoritas ada di perkotaan. Dengan pembagian yang dilakukan oleh Affan Gaffar, kita dapat memprediksi orientasi pemilih berdasarkan golongannya misalnya, seorang dari golongan *abangan* akan memiliki kecenderungan untuk memilih partai yang mengikrarkan membela "Wong Cilik".

Para pemilih kita memiliki kecenderungan berorientasi pada *ideology* daripada *policy-problem-solving* artinya mereka akan mengesampingkan program atau kebijakan yang ditawarkan oleh partai maupun oleh kandidat yang bertarung dalam Pemilu. Namun apakah itu berlaku untuk semua? ternyata tidak, buktinya para pemilih di Kabupaten Batang dengan konsep kebijakan yang ditawarkan dan dilakukan oleh Yoyok. Rakyat Kabupaten Batang merasa perlu untuk mendesak Yoyok kembali mencalonkan diri sebagai Bupati Batang seperti dikutip dari antaranews.com berikut ini;

"Ribuan warga termasuk perangkat desa Kabupaten Batang, Jawa Tengah, berunjuk rasa di depan pendopo kabupaten untuk mendesak Bupati Yoyok Riyo Sudibyo maju kembali pada Pemilihan Kepala Daerah Batang 2017.

Salah seorang pendemo, Rukila mengatakan tenaga pikiran Yoyok masih diperlukan lagi untuk memajukan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

"Oleh karena, kami berharap Pak Yoyok maju lagi pada Pilkada Batang

2017. Pak Yoyok tidak perlu mencalonkan pada Pilkada Jakarta tetapi di Batang, kami minta maju lagi," katanya."

Berdasarkan berita di atas, kita dapat sedikit bernafas lega karena tidak semua rakyat kita menentukan pilihan partai maupun kandidat hanya berdasarkan orientasi *ideology* melainkan ada segelintir masyarakat yang menentukan pilihan politiknya berdasarkan orientasi *policy-problem-solving*. Namun sebenarnya mereka berorientasi *policy-problem-solving* karena mereka telah merasakan kinerja dari Yoyok lantas bagaimana dengan para *rookie* apakah pertarungan para *rookie* akan selalu menggunakan metode "wangsit" (uang disit) agar mereka dapat terpilih. Metode "wangsit" memang cukup kental di masyarakat selain sebagai metode untuk memenangkan kandidat, metode ini juga secara tidak langsung menekan angka golput.

Tanggung jawab kita kemudian adalah meminimalisir angka golput di masyarakat dan membuat masyarakat lebih menggunakan orientasi *policy-problem-solving* dalam memilih partai maupun kandidat. Dengan orientasi *policy-problem-solving* sebenarnya secara tidak langsung akan membuat para kandidat yang bertarung dalam Pilkada terpacu untuk membuat program kerja yang pro terhadap kesejahteraan masyarakat. Meskipun program yang pro rakyat memang tidak menjamin seorang kepala daerah ketika menjabat kemudian menjalankan program kerja yang mereka tawarkan pada saat kampanye akan tetapi paling tidak dengan menggunakan orientasi *policy-problem-solving* rakyat juga dapat melakukan mekanisme *reward and punishment* dalam Pemilu yang akan datang. Rakyat kemudian tidak akan memilih kandidat yang hanya memberikan janji palsu dalam kampanye dan tidak mampu memenuhinya ketika sudah menjabat.

B.4. Pilkada dan Peninggalan Kepala Daerah Sebelumnya

Seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa Pilkada juga merupakan sebuah pertarungan program kerja dan kebijakan. Dari program kerja dan kebijakan yang dilakukan oleh seorang Bupati juga menentukan *reward and punishment* untuk para kepala daerah tersebut. *Reward* untuk memilihnya kembali dalam Pilkada selanjutnya atau *punishment* untuk tidak kembali memilihnya. Permasalahannya kemudian jika seorang kepala daerah yang layak untuk mendapat *reward* dari rakyat untuk dipilih kembali dalam Pilkada namun beliau justru memutuskan untuk tidak mencalonkan diri dalam Pilkada seperti yang terjadi pada Yoyok. Sebagai seorang bupati, beliau sudah terlanjur dicintai oleh warganya namun apa mau dikata beliau memutuskan tidak kembali mencalonkan diri. Beliau dicintai warga karena beliau dianggap berhasil membawa kabupaten Batang ke arah yang lebih baik bahkan di akhir jabatan beliau, PAD Batang sudah meningkat 300 persen dibandingkan dengan sebelum beliau menjabat.

Lantas bagaimana nasib perkembangan pesat yang telah dilakukan oleh Yoyok sepeninggal beliau, akankah bupati selanjutnya sudi untuk meneruskan kebijakan maupun program Yoyok untuk memajukan

Kabupaten Batang. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa ada semacam budaya “alergi” yang muncul mendadak segera setelah seorang menduduki jabatan yang sebelumnya diduduki oleh orang lain. Wujud dari budaya “alergi” pun macam-macam mulai dari mengganti semua dekorasi kantor dan rumah dinas sampai pada menelantarkan bahkan mengganti kebijakan yang sudah ada dan berhasil dari pemimpin sebelumnya. Parahnya budaya ini dari pusat sampai daerah dipraktikkan oleh para politisi negeri ini, kita tidak asing setiap ganti menteri akan terjadi perubahan kebijakan. Perubahan kebijakan sendiri kadang tidak memperhatikan kebijakan sebelumnya dan tidak jarang kebijakan baru sangat bertentangan dengan kebijakan sebelumnya. Salah satu kebijakan nasional yang berhasil tapi sekarang seakan terlantar adalah kebijakan Keluarga Berencana (KB) yang dicanangkan dan berhasil dijalankan pada masa orde baru kini sudah sayup sayup terdengar bahkan terkesan sudah basi akibatnya kemudian dapat kita perhatikan jumlah pertumbuhan penduduk kita sekarang sudah tidak terkontrol. Budaya inilah yang dikhawatirkan akan terjadi di Kabupaten Batang pasca ditinggalkannya kursi bupati oleh Yoyok. Namun ternyata ketika Yoyok ditanyakan perihal masalah ini beliau seakan memang sudah siap seperti yang tergambar dalam interview di bawah ini;

“Apa yang sudah Anda siapkan ketika meninggalkan Batang? Paling tidak, Anda harus menjamin jika sistem yang selama ini dibangun akan dipakai oleh bupati selanjutnya. Saya sedang bangun sistem. Contohnya yang sangat kecil, sejak saya terpilih, rumah dinas saya tidak pernah terkunci. Saya buka sebuka-bukanya. Rakyat bisa masuk semua. Kalau nantinya pengganti saya menutup pintunya dengan menempatkan Satpol PP, rakyat pasti marah. Minimal, sanksi sosial itu ada. Bagaimana (pula) yang besar, pasti marah sekali. Saya juga akan meninggalkan catatan terakhir pembangunan Batang. Mulai dari jalan yang sudah dibangun, jumlah jalan rusak, sampai kondisi infrastruktur lain. Jadi, (supaya) bupati baru sudah tahu apa yang harus dilakukan.”

Dari jawaban yang dilontarkan oleh Yoyok, seakan Yoyok menginginkan warga Kabupaten Batang menjalankan fungsi kontrol sosialnya. Fungsi sosial yang dijalankan oleh warga Kabupaten Batang sejalan dengan yang kita bahas sebelumnya dimana warga bisa memberikan *reward and punishment* jika ternyata bupati yang baru tidak mampu meneruskan kemajuan yang telah diraih oleh Yoyok atau membuat kebijakan baru yang justru membawa kabupaten Batang menuju kemunduran.

C. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan dari awal, dapat kita ketahui bersama bahwa Pilkada yang kita lakukan dengan tujuan untuk lebih mendemokratisasikan proses pemilihan kepala daerah. Tujuan yang baik ini ternyata masih banyak terdapat kekurangan dari beberapa sisi yang perlu

segera kita perbaiki agar pelaksanaan Pilkada dapat berjalan sesuai dengan tujuan awalnya yaitu mendemokratiskan pemilihan Kepala Daerah.

DAFTAR RUJUKAN

- Firmanzah. *Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Koirudin. *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Prihatmoko, Joko J. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Sumber Lainnya

- Rudl, “Yoyok Riyo Sudiiby-Sutadi Dipastikan Menang Pilkada Batang”.
<http://www.lensaindonesia.com/2011/12/11/yoyok-riyo-sudibyo-sutadi-dipastikan-menang-pilkada-batang.html> (diakses pada tanggal 6 Oktober 2016)
- Pebriansyah Ariefana, “yoyok Riyo Sudibyo Gebrakan Mayor Edan di Kabupaten Batang.”
<http://www.suara.com/wawancara/2015/12/28/070000/yoyok-riyo-sudibyo-gebrakan-mayor-edan-di-kabuaten-batang--page-2> (diakses pada tanggal 9 Oktober 2016)
- Kutnadi, “Ribuan Warga Desak Yoyok Maju Pilkada Batang”.
<http://jateng.antaraneews.com/detail/ribuan-warga-desak-yoyok-maju-pilkada-batang.html> (diakses pada tanggal 19 Oktober 2016)